

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp9,8 T (690,3%)
▼ -33,8% (yoy)

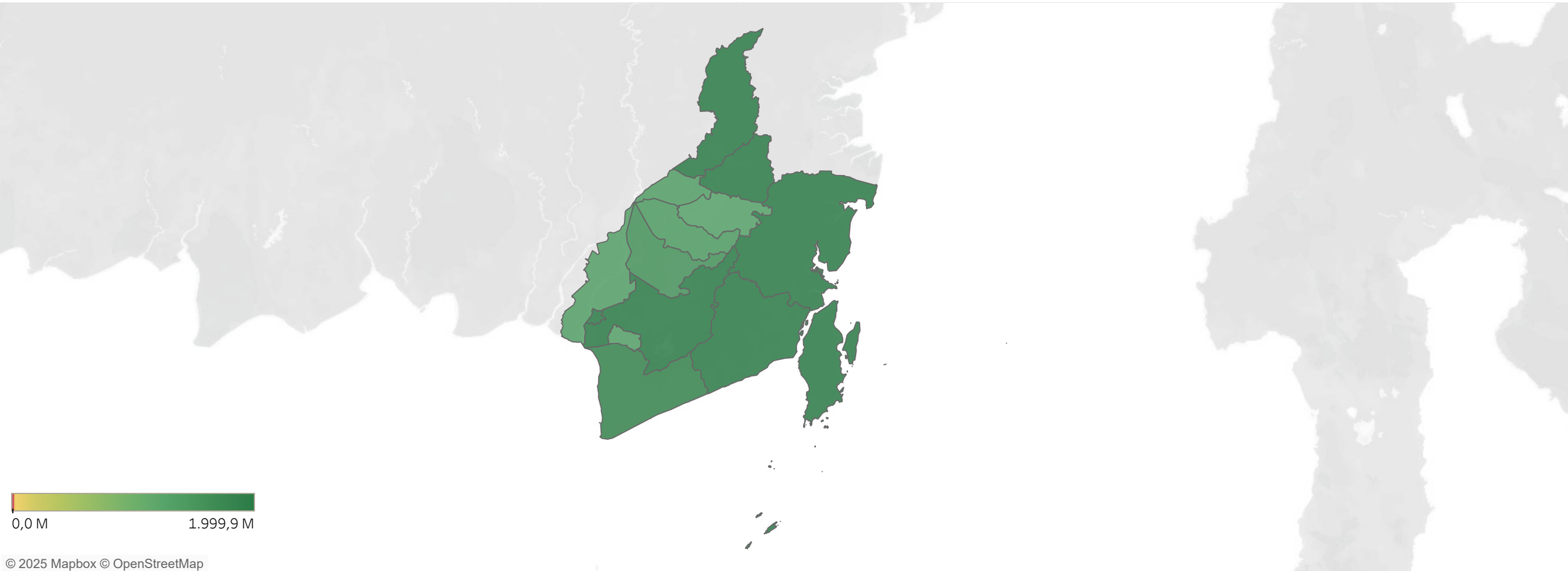
Belanja

Rp30,7 T (75,1%)
▲ 7,1% (yoy)

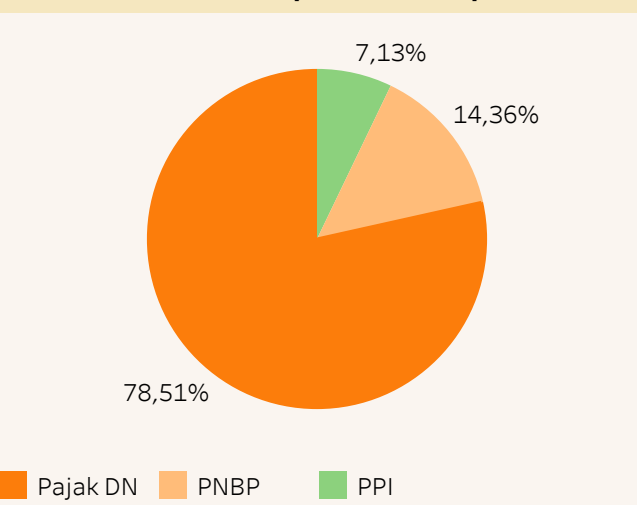
Defisit

Rp-20,9 T (52,9%)
▲ 51,2% (yoy)

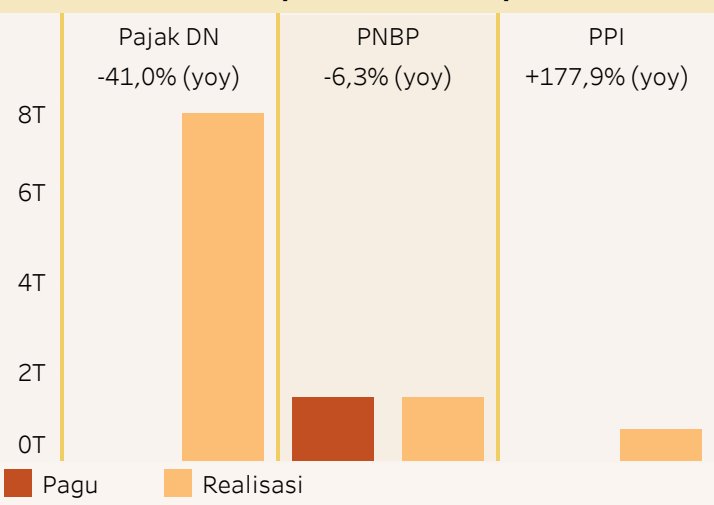
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



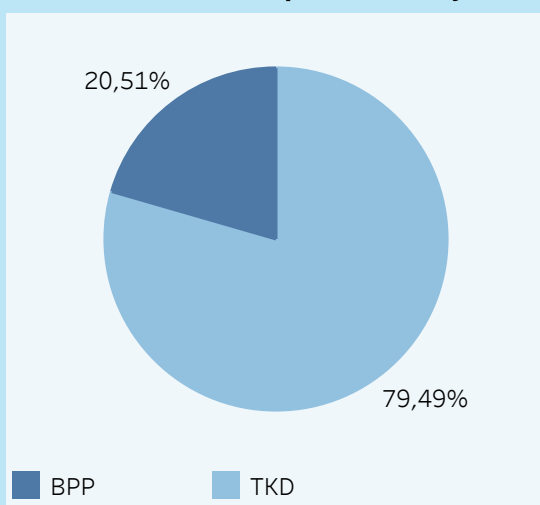
Persentase Komposisi Pendapatan



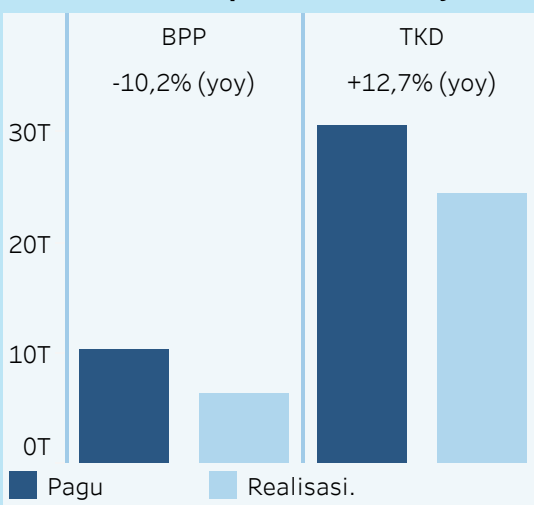
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



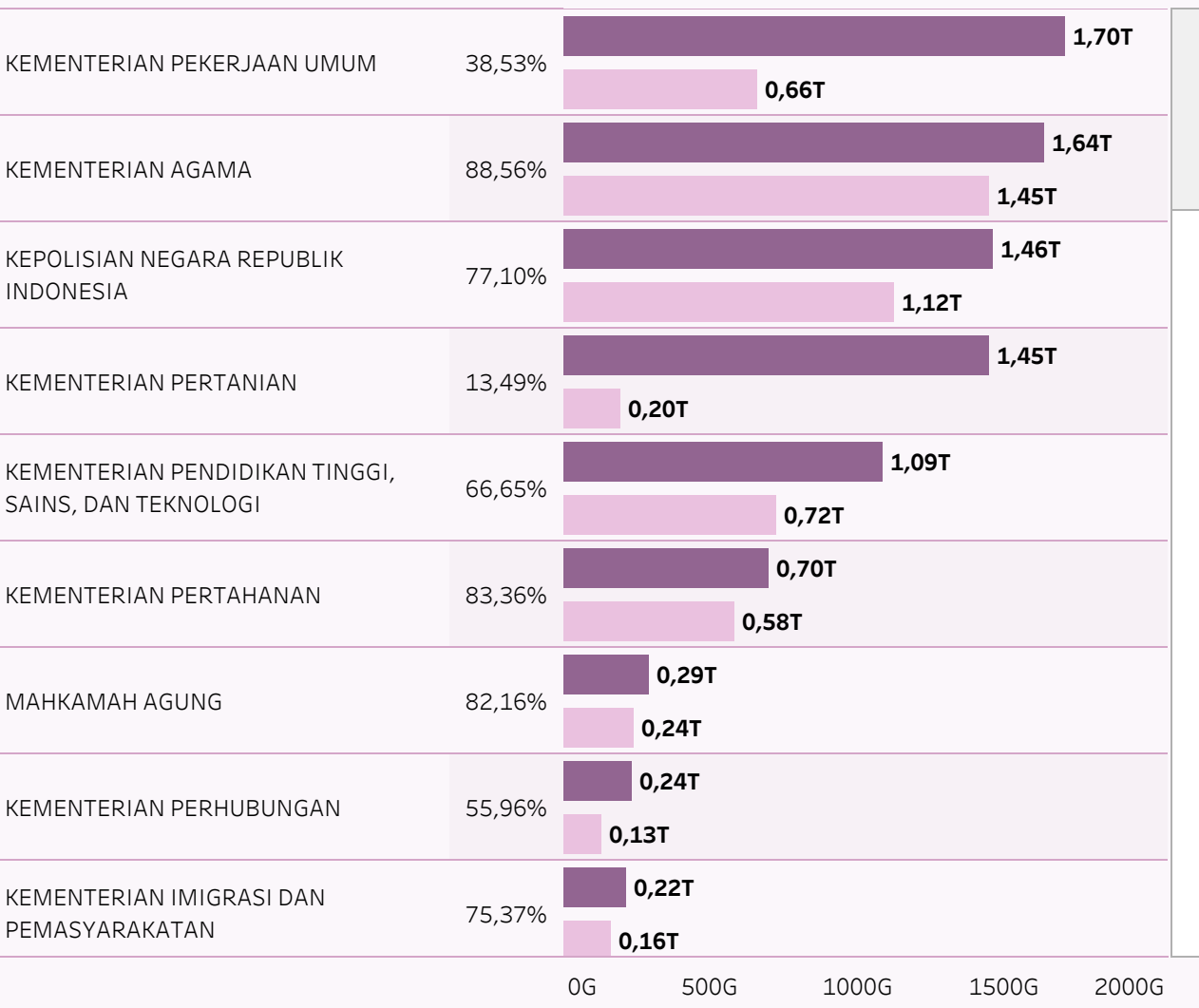
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	14,9T	9,8 T	▼ 33,80%
Grand Total	14,9T	9,8 T	▼ 33,80%

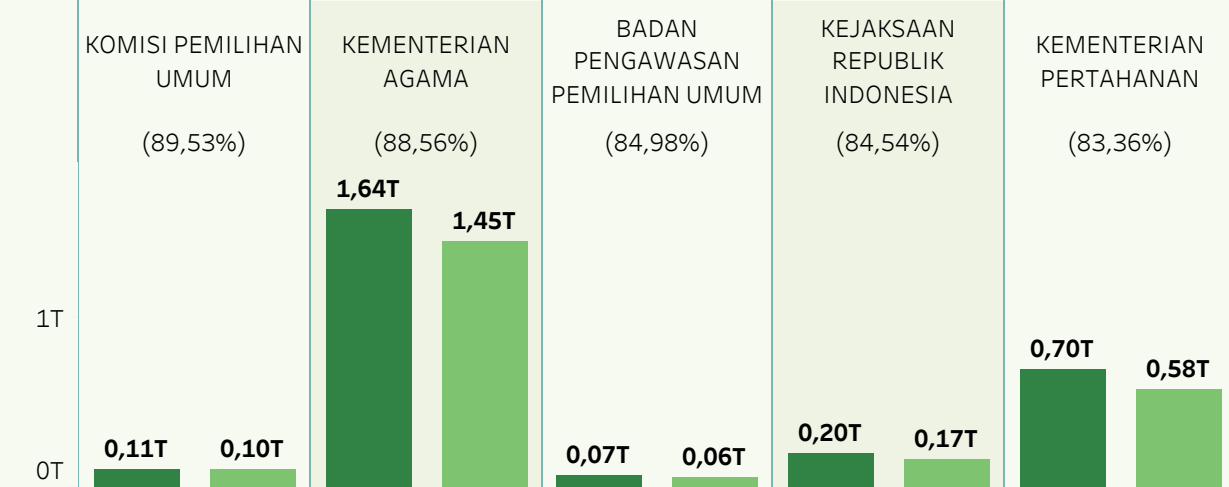
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,7T	28,7T	68,8%	40,9T	30,7 T	75,1%	▲ 7,13%
Grand Total	41,7T	28,7T	68,8%	40,9T	30,7 T	75,1%	▲ 7,13%

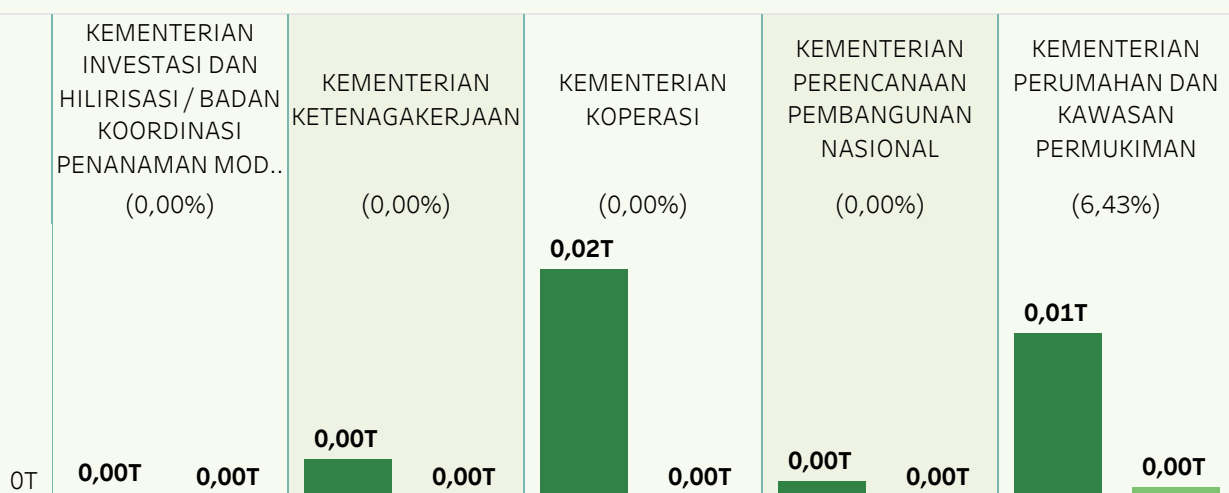
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



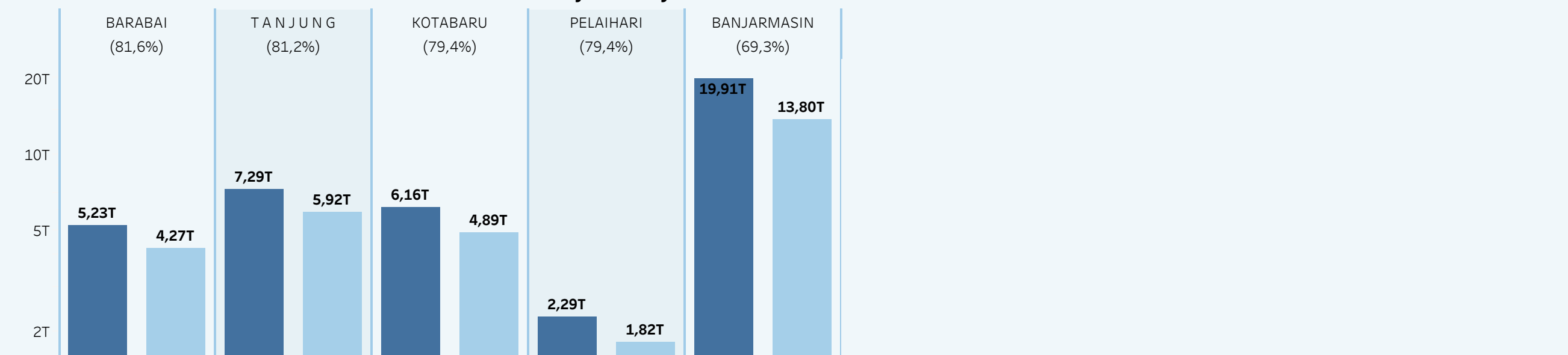
5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



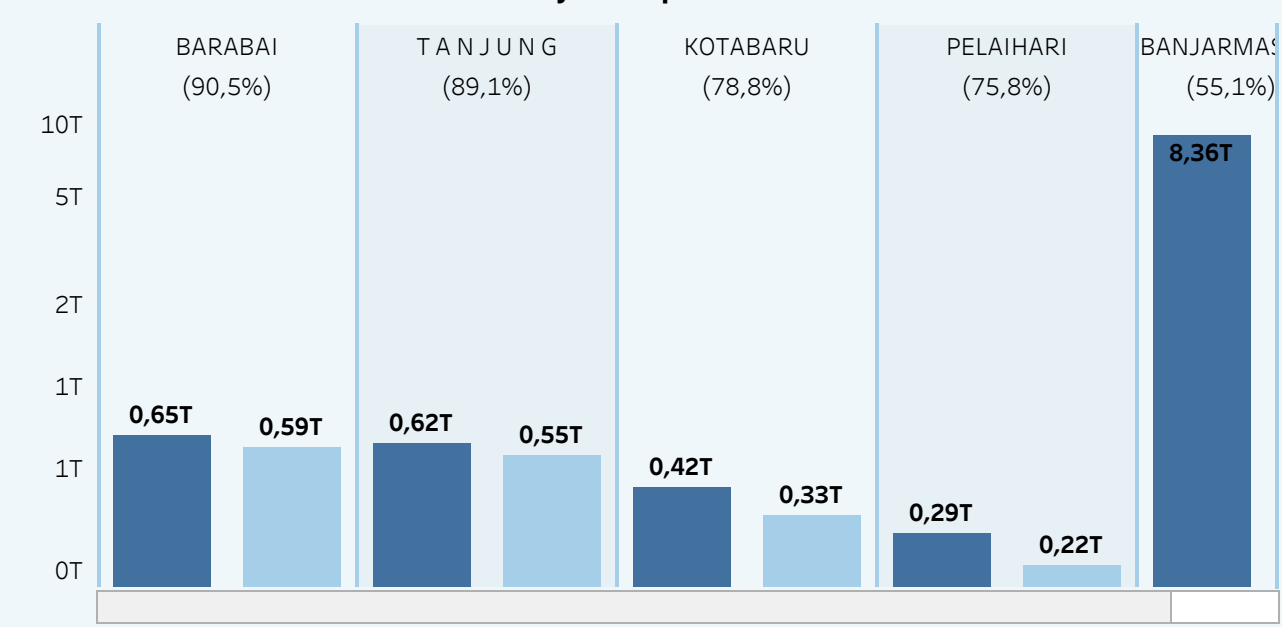
5 KL Persentase Realisasi Terendah



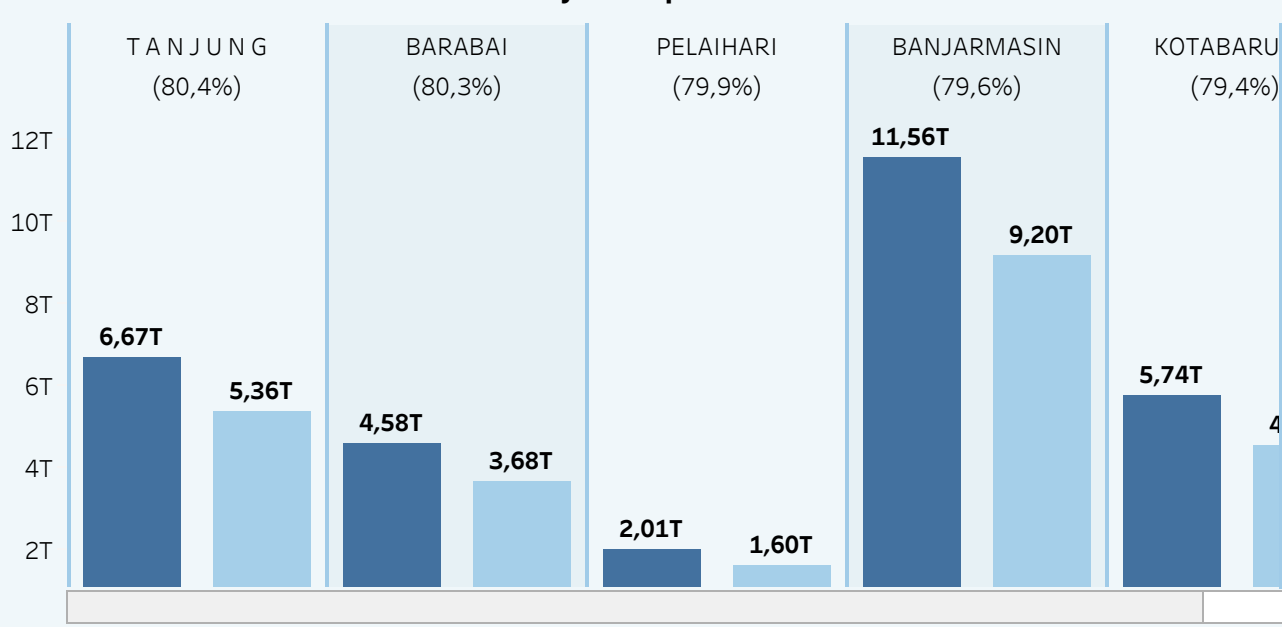
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d 17 Oktober 2025

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp9,84 triliun (44,62% dari target), terkontraksi 33,80% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 37,92% (Rp7,72 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 270,10% (Rp 701,62 miliar), PNBP mencapai 99,38% (Rp1,41 triliun) dari target pendapatan negara sebesar Rp22,04 triliun. Pendapatan negara didominasi oleh Pajak (85,64%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d 17 Oktober 2025

1. **Kinerja Belanja Negara sebesar Rp30,69 triliun (75,1%) dari pagu Rp40,89 triliun, tumbuh 7,12% yoy.** Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 60,89% (Rp6,30 triliun) dari pagu Rp10,34 triliun, terkontraksi 10,21% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 79,87% (Rp24,40 triliun) dari pagu Rp30,55 Triliun, tumbuh 12,73% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (79,49%).
2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Terbesar, Kementerian Pekerjaan Umum merupakan K/L dengan pagu terbesar yaitu Rp1,70 triliun.** Kinerja tertinggi pada 10 K/L besar terdapat pada Kementerian Agama dengan realisasi 88,56% (Rp1,45 triliun) dari pagu Rp1,64 triliun.
3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah, Komisi Pemilihan Umum merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu Rp0,10 triliun atau 89,53% dari pagu, dikonstruksi oleh belanja barang (95,43% dari pagu atau sebesar Rp61,85 miliar).** Sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan K/L dengan kinerja realisasi belanja terendah Rp0,73 miliar atau 6,43% dari pagu, rendahnya realisasi dikonstruksi oleh belanja barang (11,61% dari pagu atau sebesar Rp0,73 miliar).
4. **Kinerja KPPN, KPPN Barabai merupakan KPPN dengan realisasi tertinggi yaitu 81,60% (Rp4,27 triliun) dari pagu Rp5,23 triliun, didorong oleh kinerja belanja pegawai yang mencapai 97,32% (Rp467,46 miliar) dari pagu Rp480,34 miliar.** Sementara, KPPN Banjarmasin merupakan KPPN dengan realisasi terendah yaitu 69,30% (Rp13,80 triliun) dari pagu Rp19,91 triliun, terutama dipengaruhi oleh rendahnya belanja modal yang baru mencapai 37,32%.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Sampai dengan bulan September 2025, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalsel sebesar Rp.7,79 triliun atau 38,26% dari target dengan pertumbuhan terkontraksi 34,18%. Hampir seluruh jenis pajak realisasinya tumbuh negatif jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hanya PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang mengalami tumbuh positif.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

DJP agar mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan pajak, perluasan basis pajak melalui pendataan Wajib Pajak baru khususnya dari sektor informal dan ekonomi digital, serta peningkatan edukasi dan kampanye kepatuhan pajak kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sektor-sektor pajak yang mengalami kontraksi untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna menggali potensi pajak yang belum tergarap.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Terdapat perbedaan persepsi pada mekanisme pembayaran APBN di KPPN terkait mekanisme pembayaran belanja kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral beban akun belanja barang non operasional (5212) lingkup satker kementerian ATR/BPN dimana beberapa KPPN memperbolehkan menggunakan mekanisme LS ke rekening bendahara pengeluaran sementara KPPN yang lain menolak melalui mekanisme tersebut dan menyarankan melalui mekanisme pembayaran UP/TUP.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Direktorat pelaksanaan anggaran agar melakukan reviu atas permasalahan tersebut dan memberikan pedoman/dasar hukum pertimbangan kepada Kanwil dan KPPN terkait mekanisme pembayaran kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral beban akun belanja barang non operasional (5212) lingkup satker kementerian ATR/BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL ANALISIS TEMATIK REGIONAL

Analisis Tematik Regional

A | FLPP, Terdapat kenaikan unit dibangun tahun 2025 dari sebelumnya 15.729 unit menjadi 16.188 unit, jumlah lokasi tahun 2025 dari sebelumnya 146 lokasi menjadi 150 lokasi, jumlah penerima tahun 2025 dari sebelumnya 8.149 menjadi 8.225.

B | Giant Sea Wall, di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

C | Koperasi Desa Merah Putih, Progres realisasi anggaran masih belum terdapat realisasi dari alokasi pagu/perkiraan alokasi dana sebesar Rp6.039 M.

Progres Fase I

Jumlah Desa dan Kel yang Sudah Membentuk Koperasi Merah Putih dan Jumlah Koperasi Desa dan Kel yang Sudah Berbadan Hukum adalah sudah maksimal seperti periode berikutnya yaitu sebanyak 2.013.

Progres Fase II

2. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Akun Simkopdes (*Microsite*) sebanyak 2.013 sudah maksimal seperti periode sebelumnya
3. Jumlah Koperasi yang Sudah Memiliki Gerai (Minimal 1 Gerai) semula 97 menjadi 133.
4. Jumlah Keseluruhan Gerai Koperasi yang Sudah Aktif semula 125 menjadi 167.
5. Jumlah Koperasi Melakukan Permohonan Proposal Bisnis semula 28 menjadi 38.
6. Jumlah Permohonan Proposal Bisnis semula 111 menjadi 146.

Kanwil DJPb Kalsel telah melaksanakan Sharing Session perkembangan implementasi program KDKMP di Kalsel dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Oktober 2025.

D | Sekolah Rakyat, Realisasi Jumlah Sekolah Rakyat yang sudah berjalan tetap seperti periode sebelumnya sebanyak 3 SR. Saat ini, target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR.

E | SMA Unggul Garuda, Telah dilakukan peresmian SMA Garuda Transformasi pada SMAN Banua, oleh Menteri Ekonomi Kreatif pada tanggal 8 Oktober 2025. Peresmian SMA Garuda di Kalsel ini merupakan bagian dari peluncuran serentak di 16 Sekolah Se-Indonesia yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

F | Revitalisasi Sekolah, belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. pelaksanaan revitalisasi untuk Jumlah target sekolah yang direvitalisasi adalah 61 Sekolah yang terdiri dari 43 madrasah dan 18 sekolah di daerah transmigrasi

Progres target 43 madrasah adalah 38 madrasah dalam tahap pembangunan, dan 5 masih dalam tahap

lelang pekerjaan.

Progres target 18 sekolah adalah 12 sekolah dalam tahap pembangunan, dan 6 masih dalam tahap lelang pekerjaan

G | Ketahanan Pangan, terdapat kenaikan realisasi anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan semula Rp112,06 M (8,52%) menjadi Rp379,55M (28,87%) dari alokasi Pagu Anggaran Rp1.314,84 M

H | Ketahanan Energi, Kinerja Program Ketahanan Energi (s.d. 03 Oktober 2025), Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Tematik Regional

A | Isu FLPP, meliputi:

1. Belum adanya wadah/forum komunikasi/koordinasi di setiap daerah terkait program FLPP.
2. Kurangnya monitoring pasca-kepemilikan untuk memastikan rumah yang dibeli benar-benar ditempati oleh MBR dan memberikan manfaat optimal.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

1. Agar dibentuk forum komunikasi/koordinasi di setiap daerah untuk mendukung pelaksanaan program FLPP.
2. Pemerintah daerah dapat dilibatkan secara aktif dalam melakukan verifikasi lapangan secara berkala untuk memastikan rumah benar-benar ditempati oleh MBR sesuai peruntukannya. Perlu disusun mekanisme sanksi administratif bagi penerima manfaat yang menyalahgunakan bantuan, serta didorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok penghuni sebagai mitra pengawasan sosial.

C | Isu *Giant Sea Wall*, meliputi:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

D | Rekomendasi *Giant Sea Wall*, diperlukan:

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

E | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Terdapat informasi bahwa Penyaluran Dana Desa tahap II yang sebelumnya sempat tertunda akan kembali dilanjutkan dengan ketentuan baru, yaitu kewajiban untuk mengunggah surat kuasa penempatan dana. Dengan adanya informasi atas ketentuan ini, sepertinya setiap KDMP/KKMP diwajibkan untuk melakukan penempatan atau pinjaman modal melalui bank sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana.

F | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

koordinasi lintas pihak untuk membahas aturan terbaru mengenai Dana Desa, sehingga dapat terjalin keselarasan dan sinkronisasi dengan mekanisme pendanaan KDMP

G | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

1. Masih terdapat perbedaan persepsi antara PIC pada sekolah rakyat rintisan (Inisiatif Pemda)

- dengan Kementerian Sosial.
2. Sarana dan prasarana pada sekolah rakyat rintisan (inisiatif pemda) yang sudah berjalan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standard yang ditetapkan.

H | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan penyelarasan persepsi melalui forum koordinasi dan sinkronisasi, diperlukan penyusunan pedoman operasional bersama (*Joint Guideline*) yang mengatur peran, tanggung jawab, dan standar pelaksanaan yang disepakati kedua pihak, serta pelibatan tim teknis lintas instansi.
2. Perlu dilakukan pemetaan kondisi aktual guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas, disertai penguatan dukungan pendanaan melalui sinergi APBD, APBN, dan kemitraan dengan pihak swasta atau CSR. Upaya ini perlu diikuti dengan rencana peningkatan infrastruktur secara bertahap agar pemenuhan standar minimal dapat tercapai

I | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang '*Go Internasional*' dan kembali ke daerah untuk membangun Kalimantan Selatan.

J | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Perlu disiapkan program beasiswa, pertukaran pelajar, dan pelatihan internasional bagi peserta didik berprestasi agar mampu mengembangkan wawasan global dan kompetensi internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan reintegrasi bagi lulusan Sekolah Garuda agar potensi dan pengetahuan yang mereka peroleh di luar daerah maupun luar negeri dapat dikontribusikan kembali untuk kemajuan Kalimantan Selatan.

K | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

1. Kapasitas pengelolaan satuan pendidikan belum merata;
2. Akuntabilitas penggunaan dana masih berisiko;
3. Koordinasi lintas level pusat–daerah belum optimal;
4. Pemeliharaan pasca revitalisasi belum terencana.

L | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

1. Laksanakan bimtek dan pendampingan teknis P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan);
2. Gunakan sistem pelaporan dan monitoring digital dan tingkatkan audit berbasis risiko dan transparansi publik;
3. Bentuk tim koordinasi revitalisasi berjenjang dan tetapkan SOP komunikasi dan evaluasi berkala lintas instansi;
4. Wajibkan rencana pemeliharaan 3–5 tahun; libatkan masyarakat dan Pemda dalam perawatan berkelanjutan.

M | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Terdapat pada 8 desa dengan total hasil SID/Rencana kontrak 280,3 ha, pelaksana SID Poliban, pelaksana konstruksi swasta, pengawas konstruksi Poliban dengan status sudah berkontrak berakhir 30 September. Terdapat perpanjangan kontrak hingga 31 Oktober karena hingga 30 September prograss baru 37%.

N | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan sesuai target dan jadwal.

O | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Terdapat 2 pembangkit bio energi berjenis biomassa dengan jaringan *off grid* (tidak terhubung langsung dengan jaringan umum) di Kabupaten Tabalong dengan total kapasitas 2,6 MW, yaitu: Pembangkit pertama dikelola oleh PT. Cakung Permata Nusa I (ATA) di desa Kasiau dengan kapasitas 1,1 MW; dan Pembangkit kedua dikelola oleh PT. Astra Agro Lestari di desa Hayub dengan kapasitas 1,6 MW..

P | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi integrasi lokal, misalnya melalui penyediaan jaringan distribusi mini-grid atau skema off-taker lokal, agar listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan industri di sekitar lokasi.

HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Terdapat kenaikan jumlah SPPG sebelumnya dari 122 menjadi 134, jumlah supplier sebelumnya 92 menjadi 96, dan penerima manfaat sebelumnya 357.789 menjadi 359.142.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

1. Terdapat SPPG yang berhenti operasional karena akun maker tidak bisa *log in* sehingga pencairan dana tidak bisa dilakukan
2. Beberapa SPPG terlambat dan belum beroperasi, dikarenakan sedang menunggu terbitnya Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

1. Pihak SPPG akan berkoordinasi dengan bank terkait dan BGN Pusat untuk manajemen user dan akun maker sehingga dapat segera dilakukan pencairan.
2. Koordinator SPPG akan terus aktif memantau perkembangan progress penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bersama dengan Dinas Kesehatan terkait.